

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan, sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. peneliti hanya mengambil 5 penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Penelitian Pertama, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) DI lihat Dari Partisipasi Buah Pikiran Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

Desi Rufita, Budi Setiawati, Heni Suparti, Jurnal Stiatalong Volume 02 Nomor 02 Tahun 2019. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di lihat dari partisipasi buah pikiran Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di lihat dari partisipasi buah pikiran Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di lihat dari partisipasi buah pikiran di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan hasil cukup tinggi dengan presentase 50,83 % sedangkan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di lihat dari partisipasi buah pikiran di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong adalah faktor umur.

Penelitian Kedua, Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Fatmawati, Lukman Hakim, Mappamiring, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dinilai belum optimal, dilihat dari aspek Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi.

Penelitian Ketiga, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Pada Program Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (GERBANG EMAS) “BERSINAR” Di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Sarlinda Buana, Desak Putu Butsi Triyanti, Jamaludin. Jurnal Stiatabalong Volume 01 Nomor 02 Tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran sejauhmana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (Gerbang Emas) “Bersinar” di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong serta Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan usaha Tani Pada Program Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (Gerbang Emas) “Bersinar” di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dinilai sudah baik yaitu dengan presentase 41%

Penelitian Keempat, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung)

Agustina Setiawan, Utang Suwaryo, Mudiwati Rahmatunnisa, Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prosedur formal pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang hanya berbentuk partisipasi kehadiran fisik saja serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang hanya berbentuk partisipasi ide dan gagasan saja dengan mengabaikan partisipasi kehadiran fisik.

Penelitian Kelima, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sesilia Kristina Kusen, Novie R. Pioh, Donald K. Monintja, Jurnal Governance Volume 01 Nomor 02 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan musrenbangdes belum maksimal di desa Pinonobatuan kecamatan dumoga timur kabupaten bolaang mongondow. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah setempat sudah maksimal namun perlu ditingkatkan kembali agar masyarakat dapat lebih menyadari betapa pentingnya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) DI lihat Dari Partisipasi Buah Pikiran Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Desi Rufita, Budi Setiawati, Heni Suparti, Jurnal Stiatabalong Volume 02 Nomor 02 Tahun 2019.	Perbedaannya adalah objek penelitian karena penelitian tersebut meneliti partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dilihat dari buah pikiran di desa wayau, sedangkan penelitian yang akan diteliti meneliti partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan	Persamaannya yaitu subjek penelitian yang keduanya meneliti partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang dan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif.
2.	Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.	Perbedaannya adalah objek penelitian karena penelitian tersebut meneliti Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan	Persamaannya yaitu subjek penelitian yang keduanya meneliti partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang dan metode penelitian yang

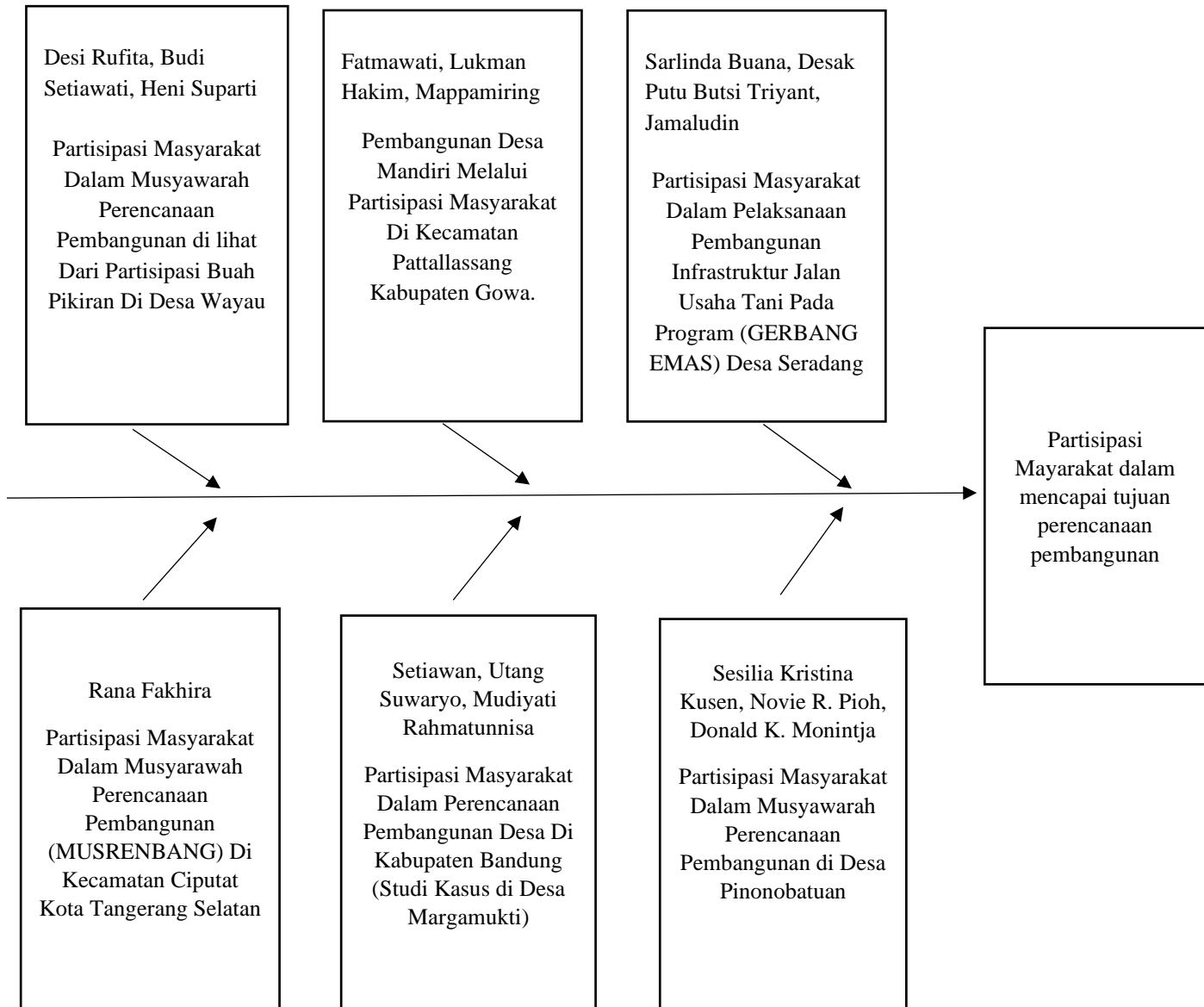
	<p>Fatmawati, Lukman Hakim, Mappamiring, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2020.</p>	<p>Pattallassang sedangkan penelitian yang akan diteliti meneliti partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di di Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.</p>	<p>sama yaitu metode kualitatif.</p>
3.	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Pada Program Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (GERBANG EMAS) “BERSINAR” Di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Jurnal Stiatabalong Volume 01 Nomor 02 Tahun 2018.</p>	<p>Perbedaannya adalah objek penelitian karena penelitian tersebut meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Pada Program Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (GERBANG EMAS) “BERSINAR” Di Desa Seradang sedangkan penelitian yang akan diteliti meneliti Partisipasi Masyarakat dalam musyawarah</p>	<p>Persamaannya yaitu subjek penelitian yang keduanya meneliti partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang dan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif.</p>

	Sarlinda Buana, Desak Putu Butsi Triyant, Jamaludin	perencanaan pembangunan di Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.	
4.	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung) Agustina Setiawan, Utang Suwaryo, Mudyati Rahmatunnisa, Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.	Perbedaannya adalah objek penelitian karena penelitian tersebut meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Desa Margamukti, sedangkan penelitian yang akan diteliti meneliti partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.	Persamaannya yaitu subjek penelitian yang keduanya meneliti partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang dan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif.

5.	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Sesilia Kristina Kusen, Novie R. Pioh, Donald K. Monintja, Jurnal Governance Volume 01 Nomor 02 Tahun 2021.	Perbedaannya adalah objek penelitian karena penelitian tersebut meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga	Persamaannya yaitu subjek penelitian yang keduanya meneliti partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang dan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif.
----	--	--	---

Pada penelitian terdahulu seperti yang telah dijabarkan diatas menunjukkan bahwa terdapat penelitian-penelitian yang mempunyai variable terkait dengan penelitian ini yaitu, partisipasi masyarakat pada suatu instansi pemerintahan ataupun pemerintahan daerah. Relevansi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bagaimana masyarakat dalam melakukan peran dan fungsinya untuk berpartisipasi. Disamping itu, terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada fokus penelitian juga pada teori yang digunakan. Penelitian terdahulu belum terdapat objek penelitian pada Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan sebagai lokus penelitian.

Gambar 2. 2 Diagram Fishbone



2.3 Kajian Teori

Kajian teori merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena sifatnya Ilmiah, Sistematis dan Akuntabilitas maka dalam penelitian yang berbasis ilmiah perlu adanya kajian teori sebagai alat ukur dan penerjemah makna yang seragam dalam mendukung sebuah fenomena yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.

2.3.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah mengambil bagian atau ikut turut serta. (Uceng Andi et al., 2019) mengatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, berupa pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. (Tesyalom et al., 2017) Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi, definisi lain, masyarakat adalah kestuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat dengan rasa identitas bersama.

Menurut (Slamet, 2003) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan- kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil hasil dari pembangunan tersebut. Seperti dalam pelaksanaan musrenbang membutuhkan partisipasi agar dapat berjalan dengan baik, karena peran masyarakat adalah point utamanya. Jika partisipasi masyarakat kurang maka untuk kedepannya akan mengalami kesulitan dalam perencanaan pembangunan yang dibutuhkan untuk lingkungan sekitar.

Adapun menurut (Notoatmodjo, 2007). Partisipasi Masyarakat adalah ikut Keterlibatannya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah sosial.

Keterlibatan masyarakat dalam bidang kesehatan berarti partisipasi semua pihak Anggota masyarakat mengatasi masalah kesehatan mereka sendiri. Dalam hal ini, komunitas itu sendiri yang aktif untuk memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat. Institusi kesehatan hanya sekadar memotivasi dan membimbingnya.

Terdapat tiga indikator partisipasi masyarakat menurut Marschall (2006) dalam (Darin et al., 2022) sebagai berikut:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat

Menyediakan forum untuk menampung partisipasi masyarakat, forum ini akan mempermudah masyarakat untuk memberikan partisipasi dan untuk meningkatkan partisipasinya.

2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses

Masyarakat mampu terlibat dalam proses partisipasi, yang berarti bahwa masyarakat harus mempunyai kemampuan serta keahlian ketika terlibat dalam partisipasi.

3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya selama proses pengambilan keputusan. (Akses ini berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk memasuki wilayah pemerintahan, yaitu mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam pengelolaan barang publik.)

Selanjutnya partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan dapat dilihat dengan beberapa indikator menurut (Wibowo, 2004) yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam perencanaan

Apabila masyarakat menggunakan hak untuk berpartisipasi dengan aktif maka dapat berpartisipasi dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat, mulai dari penyusunan rencana proyek dan kegiatan pemberdayaan desa. Ukuran

partisipasi anggota masyarakat dalam perencanaan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat berupa kehadiran pertemuan, refleksi, dan waktu. Proses penyusunan rencana pembangunan desa diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat kemudian menyusun rencana dan kegiatan pembangunan desa berdasarkan prioritas yang telah disepakati. Rencana pembangunan desa yang telah disusun digunakan sebagai dokumen acuan pelaksanaan pembangunan, dan harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai dokumen perencanaan desa. Rencana pembangunan desa diputuskan oleh seluruh warga desa secara langsung dalam musyawarah desa atau secara tidak langsung melalui rapat komite desa. Perencanaan Keterlibatan Masyarakat Mengenai penyediaan Menerima atau menolaknya. Rencana pembangunan desa yang diterima oleh pemerintah desa menjadi dokumen resmi yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan desa sesuai prioritas pembangunan.

a. Memberikan ide dan saran dalam musyawarah

Partisipasi masyarakat dalam memberikan ide dan saran menjadi media pemerintah untuk bisa melibatkan semua kalangan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam memberikan ide dan saran merupakan tingkat keikutsertaan masyarakat itu sendiri secara tidak langsung dalam memberi peningkatan kapasitas program yang akan dijalankan maupun bagi masyarakat itu sendiri.

b. Merencanakan program pembangunan desa

Dalam mencapai pembangunan yang intensif partisipasi masyarakat merupakan komponen yang penting. Tanpa adanya keterlibatan yang dilakukan terhadap desa maka pembangunan tidak akan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

c. Mengevaluasi program pembangunan desa

Evaluasi merupakan riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan keputusan mengenai objek evaluasi.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Semua rencana pembangunan disusun oleh pemerintah di bawah pelaksanaan desa. pada tahap implementasi ini keterlibatan masyarakat meliputi keterampilan, tenaga kerja, properti, dan uang. Berarti cara untuk mengundang orang untuk berpartisipasi Menyumbangkan tenaga kerja atau properti untuk sebuah proyek Perkembangan khusus biasanya bersifat fisik. Komitmen masyarakat untuk menyumbang waktu dan tenaga bahan dan material penunjang kegiatan pembangunan desa. jika orang menyumbang secara sukarela waktu, tenaga dan sumber daya material dalam pelaksanaannya Pembangunan desa berarti partisipasi masyarakat Bertanggung jawab penuh atas implementasi yang berhasil pembangunan desa tersebut.

a. Memberikan bantuan tenaga

Dalam pelaksanaan pembangunan desa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka akan semakin cepat pula pembangunan desa tersebut dapat terealisasi dengan baik terutama dalam otonomi suatu desa.

b. Merawat hasil pembangunan

Dalam merawat hasil pembangunan merupakan sebuah pemeliharaan yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga serta memelihara hasil pembangunan yang menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat.

c. Memberikan bantuan materi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (c) adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Partisipasi dalam bentuk materi dapat berupa memberikan sumbangan berupa barang seperti makanan atau

peralatan untuk melaksanakan pembangunan dan dapat berupa uang secara sukarela.

3. Partisipasi dalam pengawasan atau pemantau

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu program dengan adanya pengawasan, rencana pembangunan yang diharapkan dapat selesai dan berfungsi dengan baik. serta diharapkan lulus pengawasan dan dapat membantu untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada secara efektif dan efisien agar mencapai tujuan program.

a. Aktif dalam pengawasan pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam hal ini berupa memberikan kritik serta saran terhadap program pembangunan jika ditemukan penyelewengan dengan memberikan pengaduan kritik kepada pihak yang berwenang.

b. Aktif dalam pengawasan keuangan desa

Dalam hal ini partisipasi masyarakat dilihat dengan masyarakat ikut mencari tahu mengenai anggaran pada program pembangunan yang dilaksanakan dan apa-apa saja program pembangunan yang dilaksanakan. Biasanya pemerintah memberikan informasi mengenai anggaran program pembangunan melalui musyawarah.

Gagasan partisipasi masyarakat dalam administrasi publik meliputi kedalam dua ranah, yaitu manajemen partisipatif dan partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Osborne & Gaebler dalam (Mujibur et al.,2007) menyatakan dua prinsip yang memasuki dua ranah tersebut dalam prinsip- prinsip reinventing government. Pertama, prinsip "community owned government: empowering rather than serving" dalam hal ini menunjukkan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Kedua, adalah prinsip "decentralized goverwnent: from hierarchy to participation and teamwork" yang menunjukkan bahwa pentingnya manajemen partisipatif yang memungkinkan partisipasi karyawan pada penyelenggaraan administrasi publik.

King dan Stivers (Mujibur et al.,2007) berpendapat bahwa pemerintah bukan hanya sekedar meningkatkan kekuasaan administrasi namun diperlukan juga kolaboratif dengan masyarakat. administrator public seharusnya dapat berbagi kekuasaan dengan masyarakat serta dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat melalui kolaborasi penyelenggaraan pemerintah dengan masyarakat.

Menurut pendapat (Tjokroamidjojo, 1995) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan diperlukan usaha usaha yang nyata dengan berbagai cara dengan harapan agar partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. (Ndraha, 2000) usaha usaha untuk dapat meningkatkan partisipasi dapat dilihat dari: Proyek pembangunan dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat. dengan adanya perencanaan dan ide-ide dari masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami dan mudah di kelola oleh masyarakat.

1. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting, dengan adanya peningkatan dan pengetahuan masyarakat di bidang pembangunan ini maka mempermudah pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa.
2. Partisipasi dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya partisipasi masyarakat kepada pemerintah ini sangat memberikan efek positif bagi masyarakat itu sendiri, dan dapat di manfaatkan langsung oleh masyarakat setempat.
3. Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. dalam hal ini perlu adanya organisasi

dimasyarakat yang mampu membimbing dan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih peduli lingkungan.

2.3.2 Bentuk bentuk partisipasi

Partisipasi dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah kegiatan pembangunan desa berhasil atau tidak. Partisipasi adalah sebagai bentuk dari kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pembangunan ingin berhasil maka diperlukan dukungan dari masyarakat, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala bidang.

Menurut (Hamijoyo, 2007 : 27) ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi social. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang sudah ada, maka bentuk partisipasi yang dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud), bentuk partisipasi yang nyata misalnya berupa uang, harta benda, tenaga dan keterampilan
 - a. Partisipasi dalam bentuk uang adalah berguna untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan
 - b. partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbangkan Sebagian harta benda, misalnya berupa alat-alat kerja.
 - c. Partisipasi Tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan dari suatu program.

- d. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan tujuan agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
2. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi social, pengambilan keputusan dan partisipasi representative.
 - a. Partisipasi Buah Pikiran lebih merupakan partisipasi yang memberikan sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran, baik untuk Menyusun program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guan mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
 - b. Partisipasi Sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya. Serta dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
 - c. Dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat yang terlibat dalam setiap diskusi atau forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan Bersama.

2.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor internal (masyarakat), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi. Maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu adanya peran aparat dan lembaga formal yang ada

1. Faktor Internal

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi sebagai berikut Plumer dalam (Suryawan, 2004)

- a. Pengetahuan dan keahlian

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini akan membuat masyarakat memahami pentingnya sebuah partisipasi.

b. Pekerjaan masyarakat.

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu dapat lebih meluangkan atau tidak sedikitpun waktunya untuk dapat berpartisipasi pada suatu perencanaan pembangunan. Seringkali ada alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan berpartisipasi.

c. Tingkat Pendidikan

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

d. Jenis Kelamin

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi yang beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan dari sudut pandang yang berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Adapun faktor eksternal Sunarti (2003) dalam (Purwandari & Mussadun., 2016)

a. Kapasitas dan kapabilitas pemimpin, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena figure tokoh dan pemimpin saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Intensitas sosialisasi, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena sosialisasi aktif dari pemerintah akan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- c. Stimulus dari pemerintah atau pihak luar, hal ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat karena dibutuhkan dan dianggap dapat mendorong partisipasi masyarakat.

2.3.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan awal dari suatu kegiatan dan harus dilakukan semaksimal mungkin oleh penyelenggara pembangunan. (Huraerah, 2011) Menegaskan bahwa perencanaan pembangunan sering kali dipandang sebagai poin penting dalam keberhasilan pembangunan nasional Indonesia. karena rencana akan mengarah ke suatu pilihan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang baik pada akhirnya dapat menghasilkan suatu pembangunan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Untuk itu, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan diperlukan unsur - unsur penting didalamnya

Menurut (Soetomo, 2006), Pembangunan masyarakat dilihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan pembangunan masyarakat ada yang mengutamakan dan memberikan penekanan pada bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan dapat terwujud, dan adapula yang lebih menekankan pada hasil material, dalam pengertian proses dan mekanisme perubahan untuk mencapai suatu hasil material tidak begitu dipersoalkan, yang penting dalam waktu relatif singkat dapat dilihat hasilnya secara fisik. Lalu menurut (Solihin, 2006) mengungkapkan ada tiga tahapan perencanaan pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan dan penentuan tujuan,
2. Pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia
3. Pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.

Dari tahapan-tahapan perencanaan tersebut bisa diartikan perencanaan pembangunan wilayah atau daerah seperti berikut, yakni: suatu usaha yang bertahap dan teratur dari bermacam pelaku (aktor) baik secara umum (publik) atau melalui

pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat stakeholder lainnya pada level yang tidak sama untuk mengatasi saling ketergantungan dan keterkaitan dari segi fisik, sosial, ekonomi dan segi lingkungan lainnya.

Musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah perencanaan Pembangunan, adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan *Stakeholder* untuk membahas dan menyepakati rencana kerja pembangunan tahun depan. Pemangku kepentingan *Stakeholder* di tingkat kelurahan dan kecamatan yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan.

Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan sesuai dengan standar dan persepsi seluruh peserta. Keputusan yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pendapat, pemikiran dan ilmu dari para peserta. Musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan dengan tujuan :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah ditingkat bawahnya.
- b. Menetapkan prioritas usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan diajukan untuk selanjutnya dibahas di musrenbang kelurahan.

Pada pelaksanaan musrenbang menghadirkan narasumber yakni pihak pemberi informasi yang perlu diketahui yaitu seperti kepala pemerintahan tingkat Kelurahan, staff Kelurahan, Kepala pemerintah tingkat Kecamatan, staff Kecamatan, perwakilan dari Dinas, perwakilan LSM, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang bersangkutan, yang dimana pesertanya sendiri adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dengan melalui berbagai pembahasan yang telah disepakati bersama, sedangkan peserta musrenbang itu sendiri adalah komponen masyarakat individu atau kelompok yang berada di suatu lingkungan.

Menurut Astuti (2011) dalam (Uceng Andi., et al 2019) mengemukakan tingkat partisipasi masyarakat, yaitu :

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya hal ini berupa alat- alat kerja.
- b. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk dapat melaksanakan segala usaha- usaha agar mencapai tujuan. Sedangkan untuk partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada masyarakat yang membutuhkannya.
- c. Partisipasi buah pikir merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk Menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- d. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representative dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan kepada wakilnya yang berwenang dalam suatu organisasi.

Hubungan antara partisipasi masyarakat dengan musyawarah perencanaan pembangunan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunana adalah peran masyarakat yang secara langsung melalui sumbangan pendapat dan sasaran, masukan dalam menentukan kebutuhan melalui musyawarah yang nantinya hasil dari musyawarah adalah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

2.4 Kerangka Berfikir

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk melakukan perubahan agar menuju arah perkembangan yang lebih baik lagi bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh. Maka pemerintah daerah harus memantau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan agar apa yang sudah di usulkan dan di rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Faktor pendukung kegiatan tersebut adalah partisipasi masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan masih banyak ditemui berbagai permasalahan yaitu seperti: partisipasi masyarakat yang masih sedikit, alokasi dana yang dibatasi sehingga lebih diprioritaskan usulan yang lebih penting. Dalam kegiatan musrenbang masyarakat perlu memperhatikan indikator-indikator yang sesuai dengan teori partisipasi. Untuk memperjelas partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang maka diperlukan pisau analisis dengan menggunakan indikator dari partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Marschall (2006) dalam (Darin et al., 2022) yaitu:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat, jika ada yang menampung partisipasi masyarakat maka dapat memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan. Maksud dari indikator yang pertama adalah dilihat dari pihak apa saja yang terkait untuk dapat menampung partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. melalui sosialisasi dan pengawasan yang diberikan oleh pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di kelurahan sawah kecamatan ciputat serta berperan aktif dalam memberikan usulan pembangunan.

2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses. Dalam hal ini perlu adanya kemampuan masyarakat terlibat dalam proses ataupun terlibat langsung dalam pelaksanaan musrenbang, serta dilihat dari faktor pendorong apa yang membuat masyarakat kelurahan sawah kecamatan ciputat ingin terlibat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan musrenbang tersebut.
3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kebebasan dalam menyampaikan pendapat ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan kesempatan bagi setiap individu masyarakat untuk dapat memantau pelaksanaan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kegiatan masyarakat dalam menyampaikan usulan tersebut diharapkan masyarakat sudah mengerti manfaat dari adanya kegiatan musrenbang, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan tanggung jawab secara optimal.

Gambar 2. 3 Kerangka Berfikir Penelitian